



Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Kuala Pesisir

Hilal Hafid^{1*}, Sari Maulida Vonna²

^{1,2}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email : hilalhafid123@gmail.com^{1*}

Abstrak

Dalam sistem akuntansi kantor kecamatan Kuala Pesisir, berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Rayan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuala Pesisir, Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan, Pembinaan, Pembinaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, jasa akuntansi yang dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi adalah sebagai berikut.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah, Penerapan SAP*

Abstract

In the accounting system of the Kuala pesisir sub-district office, based on Nagan Rayan Regent Regulation No. 52 of 2016 concerning the position and organizational structure of the duties and functions of the Kuala Pesisir Sub-District, the Sub-District is an element of the regional apparatus, led by a Sub-District Head who is under and responsible to the Regent through the Regional Secretary. The sub-district has the task of leading and coordinating the administration, Development, Community Development, Public Services, Village Community Empowerment and carrying out tasks delegated by the Regent to carry out some of the government affairs that are the authority of the District. Based on this, accounting services that can be produced through the accounting system are as follows.

Keywords: *Government Accounting Standards, Government, SAP Implementation.*

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP ditetapkan dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang menguraikan akuntansi pemerintah. Ini adalah standar dan dibuat dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Sampai tahun 2003, SAP menggunakan basis cash-based, namun sejak 2004 hingga 2014, SAP menggunakan basis cash-to-cumulative. SAP berbasis akrual berbasis kas ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berbasis kas dan, sejak 2015, mengakui aset, kewajiban, dan dana ekuitas berbasis akrual.

Pelaporan keuangan pemerintah yang sangat baik dengan standar SAP. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan akuntansi, serta meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD. SAP biasanya berbentuk pernyataan yang mencakup judul standar, nomor, dan tanggal efektif. Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan tepat dan benar. Sehingga pelaporan keuangan dapat menghasilkan laporan yang baik dan benar.

Penerapan SAP juga diterapkan pada pemerintahan salah satunya di kantor camat kuala pesisir.

Kantor Pusat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Naganraya berdiri pada tahun 2009 dan meliputi wilayah kecamatan seluas 199,94 km² dengan total 16 Gampong. Pelaksanaan pelaporan keuangan pada Kantor Kecamatan Kuala Pesisir disusun secara penuh setiap tahunnya dengan tujuan menjadi bentuk transparansi dan

akuntabilitas yang berwawasan tata kelola yang baik. Untuk saat ini, catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan informasi tentang pos-pos dalam laporan keuangan selama periode tersebut untuk memungkinkan pengungkapan yang wajar.

Perencanaan dan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan di Kantor Kecamatan Pantai kuala adalah proses informasi, pencatatan, pengukuran, klasifikasi, peringkasan transaksi keuangan dan peristiwa, pelaporan, dan interpretasi hasil. Selain itu, diharapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) benar-benar diterapkan oleh instansi pemerintah di Kantor Kecamatan kuala pesisir.

LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan media informasi yang merangkum kegiatan seluruh perusahaan, biasanya dilaporkan atau disajikan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi pada suatu titik waktu tertentu atau pada suatu titik waktu tertentu, dan pada akhirnya merupakan suatu kebijakan. digunakan sebagai alat informasi saat membuat. Keputusan bagi pengguna laporan keuangan tahunan sesuai dengan kepentingannya masing-masing

Pengertian laporan keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berdasarkan “Standar Akuntansi Keuangan” (2012: 1) dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Bagian 7 sebagai berikut.

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, SAP merupakan persyaratan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Indonesia (SK No. 24 Tahun 2005). Standar akuntansi adalah pedoman atau prinsip yang mengatur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi adalah praktik khusus yang digunakan untuk menerapkan standar tersebut (Ritonga). , 2010). Standar akuntansi pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, SAP 15 merupakan persyaratan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Indonesia. Menurut Wijaya (2008), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan Indonesia. Standar ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil proses akuntansi, sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan.

INSTANSI PEMERINTAHAN

Untuk mewujudkan Kepegawaian yang handal, Pemerintah telah beberapa kali mengadakan penyesuaian atau perubahan terhadap aturan Kepegawaian mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian serta perubahan terhadap beberapa peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang Kepegawaian tersebut. Oleh karena lembaga memegang peranan yang penting maka seiring dengan perkembangan jaman, serta tuntutan masyarakat yang membawa konsekuensi pada meningkatnya beban tugas, maka Pemerintah juga mengadakan peraturan tentang peraturan Kelembagaan yang menangani bidang Kepegawaian Kantor Camat Kuala Pesisir.

KANTOR CAMAT KUALA PESISIR

Kantor camat kuala pesisir didirikan pada tahun 2009 dan mencakup total 16 Gampong, wilayah kecamatan 199,94 km², dengan unsur-unsur manajemen pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Badan atau instansi pemerintah. Undang-undang Nomor 32 (3) Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan merupakan perangkat daerah sebagai komponen pemerintah daerah. Camat adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dan dalam Peraturan Pemerintah Kecamatan Nomor 19 Tahun 2008, Camat atau sebutan lain adalah Kepala dan

Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan. . Pokja kecamatan yang dibantu oleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota dalam menjalankan misinya untuk menangani beberapa persoalan otonomi daerah dan kewajiban pemerintahan secara umum. Kabupaten Kuala Pesisir berkembang dengan baik karena perkembangannya yang sangat pesat, pengembangan sumber daya manusia mulai dari infrastruktur, dan kemampuan untuk mendukung kemajuan pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi kualitatif merupakan studi deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pendekatan induktif (Rahmat, 2019). Peneliti ingin mengetahui seberapa efektif penerapan standar akuntansi pemerintahan di kantor kecamatan kuala pesisir sehingga menggunakan metode deskripsi kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengelola Kecamatan kuala pesisir untuk penerapan akuntansi pada Kantor Pengelola Kecamatan kuala pesisir

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Pendapatan dan Deklarasi Pengelola Kecamatan terkait dengan pendataan dan pelaporan di kantor Pengelola Kecamatan kuala pesisir. Data yang diekstraksi adalah laporan keuangan Kantor Kecamatan Kuala Pesisir. Menurut Sugiyono (2018), data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Dengan menganalisis data yang terkumpul, peneliti dapat mengolah data menjadi informasi dan dengan mudah menarik kesimpulan dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar akuntansi pemerintahan yang dimaksud disini adalah standar akuntansi pemerintahan pada kantor camat kuala pesisir. Standar akuntansi pemerintahan sangatlah penting dalam hal membuat laporan-laporan keuangan pada berbagai lembaga pekantoran-perkantoran agar dapat mempermudah bagi si pelaporan termasuk juga pada kantor camat kuala pesisir. Berdasarkan laporan keuangan dikantor camat kuala pesisir sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, dikarenakan dengan adanya standar akuntansi pemerintahan dikantor camat kuala pesisir dapat mempermudah dalam hal membuat laporan keuaangan, menghitung pemasukan dan pengeluaran, penerimaan biaya, pengeluaran biaya, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Namun SDM dikantor camat kuala pesisir belum banyak yang mengetahui bagaimana cara penerapan SAP. Dan SAP harus diterapkan dikarenakan agar mempermudah saat membuat laporan keuangan. berikut ini adalah proses serta tujuan nya:

Perencanaan

Perencanaan berlangsung di kantor camat kuala pesisir, proses bagaimana mencapai tujuan masa depan, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan.

Pelaksanaan

Tindakan yang diambil setelah perencanaan yang cermat dan rinci. Dengan sumber daya yang kompeten dan memadai, kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Penatausahaan

Tugas akuntansi mencakup tanggung jawab untuk menerima tanda terima, pengeluaran, penutupan buku pada akhir setiap bulan, dan penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas ini.

Pertanggung jawaban

Bentuk konsistensi penggunaan dana yang dipercayakan kepada Perbendaharaan. Tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang diperhitungkan atas segala sesuatu yang terjadi dan kewajiban untuk memperbaiki segala kerugian yang mungkin terjadi.

Tugas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor camat kuala pesisir adalah menggunakan SAP untuk memasukkan data pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh Kantor camat kuala pesisir selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengeluaran pada Kantor Camat kuala pesisir dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, yang terdiri atas:

a) Belanja pegawai, yakni belanja yang berhubungan langsung dengan pegawai daerah yang ada di lingkungan Kantor Camat kuala pesisir berupa gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya yang bersifat variabel atau tidak tetap.

b) Belanja barang, merupakan pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa antara lain biaya alat tulis kantor, biaya cetak dan penggandaan, biaya pemeliharaan peralatan kantor, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya BBM, biaya jasa servis dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, belanja makanan dan minuman, dan lain sebagainya.

2) Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin (aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung, meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain-lain sebagainya.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut dapat berupa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diadopsi pada tahun 1972 sebagai alternatif Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP disediakan dalam bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang memberikan gambaran umum tentang standar akuntansi pemerintah. Kepatuhan dibuat menggunakan Kerangka Konseptual Pemerintah.

Dasar akuntansi merupakan faktor lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa catatan akuntansi yang baik memfasilitasi pemrosesan dan pelaporan untuk tujuan pemerintah dan membantu UKM mengatur pembukuan mereka. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar yang digunakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Simanjuntak, 2005). Sampai tahun 2003, SAP menggunakan basis cash-based, namun sejak 2004 hingga 2014, SAP menggunakan basis cash-to-cumulative. SAP berbasis akrual berbasis kas ini adalah SAP berbasis akrual yang mencatat pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berbasis kas dan mengakui aset, kewajiban, dan dana ekuitas berdasarkan akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia telah menerapkan SAP berbasis batas.

SIMPULAN

Perencanaan dan penerapan Standar Akuntansi Nasional di Kantor Kecamatan Pantai Quala adalah proses informasi, pencatatan, pengukuran, klasifikasi, peringkasan transaksi keuangan dan peristiwa, pelaporan, dan interpretasi hasil. Selain itu, diharapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) benar-benar diterapkan oleh instansi pemerintah di Kantor Kecamatan kuala pesisir

Untuk mendapatkan pegawai yang handal, pemerintah juga merevisi pokok-pokok kepegawaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, serta melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan peraturan ketenagakerjaan. Kepegawaian sebagai beberapa perubahan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang. Pemerintah juga menerbitkan peraturan tentang peraturan kelembagaan yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusia, karena sistem memainkan peran penting di samping fakta bahwa waktu dan tuntutan masyarakat mempengaruhi peningkatan beban kerja. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PNS, PNS dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan perilakunya, serta kualitas pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Kemenkeu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-41/Pb/2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara, Jakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
- Standar Akuntansi Merupakan Pedoman Atau Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Perlakuan Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Tujuan Pelaporan Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan, Sedangkan Prosedur Akuntansi Merupakan Praktik Khusus Yang Digunakan Untuk Mengimplementasikan Standar (Ritonga, 2010).
- Rahmat. P. S. (2019). Penelitian Kualitatif, 1 [Http://Yusuf.Staff.Ub.Ac.Id/Files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.Pdf](http://Yusuf.Staff.Ub.Ac.Id/Files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.Pdf)
- Sugiono (2018). Bab Iii - Metode Penelitian. Metode Pengumpulan Data, 33
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
<https://Kecngampel.Kendalkab.Go.Id/Jajaran/Seksi-Pemberdayaan-Masyarakat/>
Kakisina, Sophia Molinda. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas (Jam Pembnas)*, 2020, 7.1: 53-62.
Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal Emba*, 4(1), 1392–1399.
Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.